

BAB II

KERANGKA TEORI/KERANGKA KONSEP

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian “*Co-cultural Communication* Penyandang Disabilitas Tuli dalam Rumah Ibadah”, peneliti menggunakan empat penelitian terdahulu sebagai referensi dan melihat relevansi mengenai konsep dasar yang diteliti.

Penelitian pertama diambil dari jurnal berjudul “The Social Harmony of Local Religious Groups” yang ditulis oleh Hapsari Dwiningtyas Sulistyani, Turnomo Rahardjo, dan Lintang Ratri Rahmiaji pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan memahami strategi negosiasi identitas yang digunakan oleh kelompok keagamaan minoritas dengan kelompok agama dominan untuk tercapainya keharmonisan sosial. Sehingga konsep yang digunakan adalah *Co-cultural Communication*. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode fenomenologi dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada kelompok agama Kawruh Jiwa di Salatiga dan kelompok agama Sapta Dharma di Brebes yang keduanya merupakan kelompok agama minoritas di daerahnya masing-masing. Penelitian ini menemukan bahwa kelompok agama minoritas harus melakukan negosiasi identitas dengan *co-cultural communication* agar bisa diterima oleh kelompok dominan. Terdapat tiga strategi komunikasi yang dilakukan oleh kelompok agama minoritas yang menghasilkan posisi *co-cultural* masing-masing (1) edukasi mengenai keagamaan mereka menciptakan akomodasi dengan kelompok dominan, (2) sensor pribadi atau pengakuan diri palsu sebagai penganut agama dominan menciptakan asimilasi, dan (3) tawar menawar menciptakan separasi dengan kelompok dominan.

Penelitian pertama ini menjadi referensi mengenai teori dan metode penelitian yang hendak peneliti lakukan. Di mana teori *Co-cultural Communication* sama dengan teori yang peneliti akan gunakan. Juga metode penelitian berupa kualitatif, dengan metode wawancara mendalam pada pihak kelompok minoritas. Perbedaannya, penelitian peneliti akan memilih kelompok minoritas disabilitas Tuli

dan melihat cara mereka melakukan negosiasi identitas dalam beribadah di rumah ibadah masing-masing yang selama ini dirancang untuk kelompok dominan (non-disabilitas). Penelitian ini memberi pemahaman lebih kepada peneliti terkait sudut pandang teori dan eksekusi penelitian.

Penelitian kedua berjudul “The Fulfillment of the Rights of Deaf People to Obtaining Sign Language Interpreters at Religious Practices in Indonesia: A Law and Human Rights Perspective” yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Alya Syafira dan Heru Susetyo. Peneliti bertujuan untuk memberi pandangan dan rekomendasi pada pemerintah untuk memfasilitasi teman Tuli dalam konteks praktik keagamaan di rumah ibadah, terutama dalam akses memahami materi, tata perayaan, dan berbagai praktik keagamaan lainnya. Peneliti mengolah penelitian dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia, terutama HAM warga negara Indonesia, dan Aksesibilitas terkhusus penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI). Dalam mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur dan data sekunder berupa wawancara dan penelitian lapangan di daerah Jakarta, Medan, dan Bandung. Adapun penelitian tersebut dilakukan pada dua macam rumah ibadah, yaitu Masjid dan Gereja Katolik. Penelitian ini menemukan bahwa rumah ibadah di Indonesia, terutama yang berskala besar, belum memfasilitasi JBI dalam ibadah untuk teman Tuli. Pemerintah pusat dan regional pun belum memberi perhatian pada masalah ini sehingga belum terdapat peraturan yang memberi urgensi pada aksesibilitas teman Tuli dalam beribadah.

Penelitian ini menunjukkan urgensi dari penelitian peneliti, bahwa sebagian besar rumah ibadah di Indonesia belum inklusif dan belum memberi akses bagi teman Tuli dalam melakukan praktik keagamaannya. Padahal dari sudut pandang hukum dan HAM seharusnya teman Tuli mendapat hak aksesibilitas tersebut. Namun, pada kenyataannya pihak berwajib belum melihat hal ini sebagai sebuah masalah yang perlu diperhatikan. Maka dari itu, penelitian ini menyumbangkan kesadaran bagi peneliti bahwa perlu untuk memberi pemahaman dan *awareness* lebih kepada pemerintah atau pengelola rumah ibadah terkait aksesibilitas teman Tuli. Selain itu, jurnal ini juga memberi wawasan peneliti mengenai kesenjangan hukum dengan praktik yang menambah urgensi masalah penelitian.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

Aspek	Penelitian 1	Penelitian 2
Nama Peneliti	Hapsari Dwiningtyas Sulistyani, Turnomo Rahardjo, Lintang Ratri Rahmiaji	Alya Syafira & Heru Susetyo
Judul Artikel	The Social Harmony of Local Religious Group	The Fulfillment of the Rights of Deaf People to Obtaining Sign Language Interpreters at Religious Practices in Indonesia: A Law and Human Rights Perspective
Teori/Konsep	Co-cultural Theory	Hak Asasi Manusia & Aksesibilitas
Metodologi	Kualitatif, fenomenologi Pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada kelompok agama Kawruh Jiwa di Salatiga dan kelompok agama Sapta Dharma di Brebes	Kualitatif Pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan penelitian lapangan di Jakarta, Bandung, dan Medan
Hasil Penelitian dan Kesimpulan	Kelompok agama minoritas harus melakukan negosiasi identitas dengan <i>co-cultural communication</i> agar bisa diterima oleh kelompok dominan. Terdapat 3 strategi komunikasi yang menghasilkan posisi <i>co-cultural</i> masing-masing (1) edukasi menciptakan akomodasi (2) sensor pribadi menciptakan asimilasi (3) tawar menawar menciptakan separasi.	Rumah ibadah di Indonesia, terutama yang berskala besar, belum memfasilitasi JBI dalam ibadah untuk teman Tuli. Pemerintah pusat dan regional belum memperhatikan hal ini dan belum memiliki peraturan terkait aksesibilitas tersebut.
Referensi: Nama Jurnal Vol, Nomor, Tahun	Informasi Vol 50, No 1, 2020	Atlantis Press Vol 130, 2020 Proceeding of 3 rd ICLAVE 2019
Link Jurnal	https://doi.org/10.1080/10646175.2012.722838	https://dx.doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.036

Kedua penelitian terdahulu ini memberi pemahaman dan gambaran lebih luas terhadap penelitian peneliti, terutama dalam teori yang ingin peneliti gunakan dan inklusifitas aksesibilitas komunikasi serta urgensinya pada penyandang disabilitas. Namun, penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih mengarah secara spesifik mengenai adaptasi komunikasi penyandang disabilitas Tuli yang terjadi dalam peribadatan umum di rumah ibadah, dikemas dalam sudut pandang teori *Co-cultural Communication* dan juga melihat aksesibilitas yang inklusif di dalamnya. Penelitian ini hendak mengetahui bagaimana komunikasi dalam rumah ibadah bisa inklusif bagi teman Tuli dan bagaimana teman Tuli selama ini mengikuti ibadah dalam rumah ibadahnya.

2.2 Teori atau Konsep yang digunakan

2.2.1 Co-cultural Communication

Co-cultural Communication atau Komunikasi Budaya Pendamping merupakan teori yang dikemukakan oleh Mark Orbe. Teori ini merupakan perpanjangan dari teori *Standpoint* dan teori *Muted Group*, yang keduanya fokus melihat dari sudut pandang kaum marginal (dalam hal ini perempuan). Di mana teori *Muted Group* membahas mengenai adanya kelompok superior yang berada di atas hirarki sosial dan menentukan sistem komunikasi masyarakat tersebut (E. Ardener, 1978; Orbe, 1998). Dengan ini membuat kelompok masyarakat yang tidak dominan harus mengikuti standar dan cara komunikasi yang ditetapkan, sehingga terbatasnya ruang komunikasi otentik yang merepresentasikan pengalamannya (S. Ardener, 1975; Orbe, 1998). Dalam teori ini Kramarae membahas kelompok non-dominan (*co-cultural*) berupa perempuan yang “dibisukan” sistem komunikasinya oleh laki-laki sebagai kelompok dominan, sehingga para perempuan harus mengikuti dan mengubah komunikasinya sesuai standar komunikasi laki-laki. Sedangkan Orbe membahas kelompok non-dominan berupa masyarakat Afrikan Amerikan dan Eropa Amerikan yang tinggal di

Amerika Serikat harus menjaga atau menyesuaikan cara komunikasi dengan budaya Amerika Serikat. Namun, di dalamnya dibahas mengenai usaha kelompok non-dominan melakukan strategi komunikasi untuk mendapatkan atau didengarkan suaranya dalam struktur masyarakat dominan. (Orbe, 1998).

Sedangkan teori *Standpoint* membahas mengenai posisi sosial spesifik yang terbentuk dari hasil pengalaman nyata orang tersebut sehingga menciptakan pandangan subjektif akan dunia. Teori ini berfokus pada pengalaman hidup kelompok non-dominan, yaitu perempuan, yang berbeda sehingga mempengaruhi pandangan dan pemahaman berbeda pula terhadap dunia. Adapun pengalaman hidup tersebut bersifat sehari-hari dan bisa selalu berubah serta berbeda antara kelompok satu dengan lainnya sehingga menciptakan pandangan atau *standpoint* yang beragam pula. Selain itu, teori ini menyatakan bahwa kelompok non-dominan memiliki pandangan ganda dalam melihat struktur sosial dominan dari mata orang luar atau asing serta melihat dari pandangnya sendiri (Orbe, 1998).

Dengan ini, teori *Co-cultural Communication* sebagai perpanjangan kedua teori tersebut, menghubungkan pengalaman kelompok non-dominan dengan kelompok lain sembari memperhatikan cara-cara yang tercipta berbeda antara satu dan lainnya (Orbe, 1998). Dalam kata lain, teori *Co-cultural Communication* ini mengambil keadaan teori *Muted Group* bahwa adanya kelompok non-dominan yang dibatasi komunikasinya dengan mengikuti standar kelompok dominan sehingga menciptakan usaha dan strategi komunikasi untuk bisa bertahan maupun menghilangkan batasan komunikasi tersebut. Kemudian melihatnya dari sudut pandang teori *Standpoint* mengenai pembentukan dan pemilihan strategi tersebut menurut pengalaman dan realitas kelompok non-dominan.

Sama halnya dengan kedua teori tersebut, teori *Co-cultural Communication* juga merupakan bagian dari *Intercultural Communication* atau Komunikasi Antarbudaya. Teori ini sama-sama mengambil sudut pandang kaum marginal yang dirujuk dengan istilah “*co-cultural group*”.

Dalam teori *Intercultural Communication* disebut dengan istilah kelompok “*subculture*”, yaitu kelompok sosial yang ada di dalam sebuah kultur dengan posisi lebih sedikit atau tidak superior (Jandt, 2018).

Namun, *co-cultural group* yang dimaksud dalam teori ini tidak sebatas perempuan seperti teori *standpoint* dan teori *muted group*, melainkan segala kelompok minoritas yang lebih luas seperti kaum *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender*, dan *Queer* yang biasa disebut LGBTQ. Selain itu termasuk kelompok dengan perbedaan ras, perekonomian, disabilitas, agama, dan bahkan kesenjangan usia yang termasuk sebagai kelompok dengan kekuatan atau kuasa lebih kecil dibanding kelompok mayoritas di tempat tersebut (Griffin, Ledbetter, & Sparks, 2019).

Kelompok *co-cultural* ini mengerahkan komunikasi strategis untuk berusaha didengarkan oleh kelompok dominan, tapi pada akhirnya tetap terabaikan. Kesenjangan yang ada ini membuat komunikasi antar kelompok menjadi sulit. Sedangkan pada kenyataannya interaksi antar kedua kelompok ini tidak bisa dihindari melihat struktur sosial yang ada. Maka dari itu, kelompok *co-cultural* mengadopsi praktik komunikasi spesifik untuk dapat bertahan dalam situasi yang ada (Orbe, 1998). Dengan ini, teori *Co-cultural Communication* melihat bagaimana komunikasi terjadi di antara kelompok minoritas dan kelompok mayoritas, terkhusus dari sudut pandang kelompok *co-cultural* (Griffin, Ledbetter, & Sparks, 2019). Secara singkat Mark Orbe mengartikan *Co-cultural Communication* sebagai komunikasi antara anggota kelompok “dominan” dan “non-dominan” (Orbe, 1998).

Dalam teori ini, Orbe menemukan sembilan orientasi komunikasi yang dilakukan oleh kelompok *co-cultural* dalam berkomunikasi dengan kelompok dominan. Adapun ke sembilan orientasi komunikasi tersebut memiliki tujuan atau hasil akhir (*outcome*) dan pendekatan (*approach*) yang berbeda-beda. Jadi orientasi komunikasi yang dimaksud adalah preferensi hasil akhir yang ingin dicapai oleh kelompok *co-cultural* dengan melakukan

pendekatan komunikasi sesuai tujuannya (Griffin, Ledbetter, & Sparks, 2019). Seluruh konsep ini digambarkan dengan bagan berikut:

		PREFERRED OUTCOME		
		Assimilation	Accommodation	Separation
COMMUNICATION APPROACH	Nonassertive	Emphasizing commonalities Developing positive face Censoring self Averting controversy 1	Increasing visibility Dispelling stereotypes 4	Avoiding Maintaining personal barriers 7
	Assertive	Extensive preparation Overcompensating Manipulating stereotypes Bargaining 2	Communicating self Intragroup networking Utilizing liaisons Educating others 5	Exemplifying strengths Embracing stereotypes 8
	Aggressive	Dissociating Mirroring Strategic distancing Ridiculing self 3	Confronting Gaining advantage 6	Attacking Sabotaging others 9

Gambar 2.1 Orientasi komunikasi dalam co-cultural communication

Sumber: (Griffin, Ledbetter, & Sparks, 2019)

Dari bagan ini bisa dilihat bahwa kelompok *co-cultural* memiliki tiga preferensi tujuan kerja sama yang ingin dicapai dalam hal berhadapan dengan kelompok dominan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan separasi. Adapun dalam mencapai tujuan tersebut, bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan berdasarkan tingkat “kehalusannya”, yaitu secara tidak asertif, asertif, dan agresif. Dengan ini ditemukan sembilan orientasi komunikasi dengan 26 strategi komunikasi yang dapat dilakukan.

Berdasarkan tujuan hasil akhir yang ingin dicapai, dibagi menjadi tiga tujuan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Asimilasi: bertujuan untuk menghilangkan perbedaan dengan menghilangkan karakteristik budaya kelompok *co-cultural* dan berbaur dengan budaya kelompok dominan. Kelompok *co-cultural* belajar dan menggunakan struktur komunikasi dari kelompok dominan tanpa menggunakan komunikasi yang biasa

digunakannya. Tujuan ini dipilih bagi mereka yang ingin *fit in* atau tergabung dalam kelompok dominan (Orbe, 1998).

- 2) Akomodasi: berusaha untuk mengubah struktur komunikasi atau peraturan dari kelompok dominan agar disesuaikan dengan kebutuhan kelompok *co-cultural*. Tujuan ini memiliki semangat kerja sama, saling mengapresiasi kebutuhan, dan menciptakan kolaborasi antar perbedaan budaya agar kelompok *co-cultural* tidak terbungkam (Orbe, 1998).
- 3) Separasi: menolak untuk bergabung dan membentuk hubungan yang selaras dengan kelompok dominan, melainkan memilih untuk mempertahankan identitas kelompok *co-cultural* secara tegas dan menjaga hubungan dalam kelompok sendiri. Tidak ingin mengikuti ataupun mengubah peraturan kelompok dominan, tapi menciptakan dan menghidupi peraturan sendiri (Orbe, 1998).

Perbedaan pendekatan yang dimaksud dalam mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Non-assertif: pendekatan yang tidak konfrontatif dan menempatkan kebutuhan orang lain atau kelompok dominan dibanding kebutuhan diri. Seperti menghaluskan cara bicara dan seakan-akan memihak pada kelompok dominan (Orbe, 1998).
- 2) Assertif: keseimbangan antara pendekatan non-assertif dan agresif. Mengekspresikan perilaku sesuai kebutuhan diri dan sesama. Kelompok *co-cultural* berusaha mengakomodasi suara mereka untuk mempromosikan hak, kebutuhan, dan keinginan mereka tanpa melanggar hak kelompok dominan atau kelompok lain (Orbe, 1998).
- 3) Agresif: ekspresi yang menyakitkan, mempromosikan diri, dan mengontrol pilihan orang lain. Dengan kata lain memaksakan keinginan kelompok *co-cultural* dengan tindakan yang

merugikan. Biasa pendekatan ini dilakukan karena pendekatan lainnya tidak berhasil (Orbe, 1998).

Dengan ini, gabungan pemilihan tujuan beserta pendekatannya menghasilkan sembilan orientasi komunikasi dengan berbagai macam strategi komunikasi di dalamnya, yaitu:

- 1) Orientasi mencapai asimilasi secara non-asertif
 - a. Strategi *emphasizing commonalities*
 - b. Strategi *developing positive face*
 - c. Strategi *censoring self*
 - d. Strategi *averting controversy*
- 2) Orientasi mencapai asimilasi secara asertif
 - a. Strategi *extensive preparation*
 - b. Strategi *overcompensating*
 - c. Strategi *manipulating stereotypes*
 - d. Strategi *bargaining*
- 3) Orientasi mencapai asimilasi secara agresif
 - a. Strategi *dissociating*
 - b. Strategi *mirroring*
 - c. Strategi *strategic distancing*
 - d. Strategi *ridiculing self*
- 4) Orientasi mencapai akomodasi secara non-asertif
 - a. Strategi *increasing visibility*
 - b. Strategi *dispelling stereotypes*
- 5) Orientasi mencapai akomodasi secara asertif
 - a. Strategi *communicating self*
 - b. Strategi *intragroup networking*
 - c. Strategi *utilizing liaisons*
 - d. Strategi *educating others*
- 6) Orientasi mencapai akomodasi secara agresif
 - a. Strategi *confroting*
 - b. Strategi *gaining advantages*
- 7) Orientasi mencapai separasi secara non-asertif
 - a. Strategi *avoiding*
 - b. Strategi *maintaining personal barriers*
- 8) Orientasi mencapai separasi secara asertif
 - a. Strategi *exemplifying strengths*
 - b. Strategi *embracing stereotypes*
- 9) Orientasi mencapai separasi secara agresif

- a. Strategi *attacking*
- b. Strategi *sabotaging others*

Dari sekian banyak praktik komunikasi yang dapat dilakukan, selain karena tujuan yang ingin dicapai dan juga pendekatan yang sesuai, ditemukan empat faktor lain yang mempengaruhi keputusan kelompok *co-cultural* untuk memilih praktik komunikasi mana yang digunakan dalam berhadapan dengan kelompok dominan, yaitu:

- 1) *Field of experience*: mengenai banyaknya pengalaman yang sudah pernah dilakukan dengan kelompok dominan. Melihat pendekatan mana yang cocok dengan konsekuensi yang diperoleh (Griffin, Ledbetter, & Sparks, 2019).
- 2) *Situational context*: melihat tindakan mana yang di rasa aman dalam sebuah situasi yang ada di sekitar atau *setting*. Tindakan tergantung sedang di tempat apa dan dengan siapa mereka berada (Griffin, Ledbetter, & Sparks, 2019).
- 3) *Ability*: mengenai kemampuan atau keberanian seseorang melakukan tindakan tertentu. Tidak semua orang berani langsung menyerang ataupun mampu tetap berdiam (Griffin, Ledbetter, & Sparks, 2019).
- 4) *Perceived cost and rewards*: mempertimbangkan dampak dalam jangka panjang di masa depan sebagai konsekuensi dari tindakan yang dipilih (Griffin, Ledbetter, & Sparks, 2019).

Dalam penelitian ini, akan dilihat preferensi tujuan teman Tuli dalam beradaptasi di rumah ibadah kelompok dominan dan dengan pendekatan mana teman Tuli mencapai tujuan tersebut. Serta melihat alasan pemilihan orientasi komunikasi tersebut. Tujuan dari penggunaan teori ini adalah untuk mengetahui pertanyaan peneliti mengenai bagaimana penyandang disabilitas Tuli melakukan adaptasi komunikasi dalam beribadah di rumah ibadah umum yang selama ini telah dilakukan.

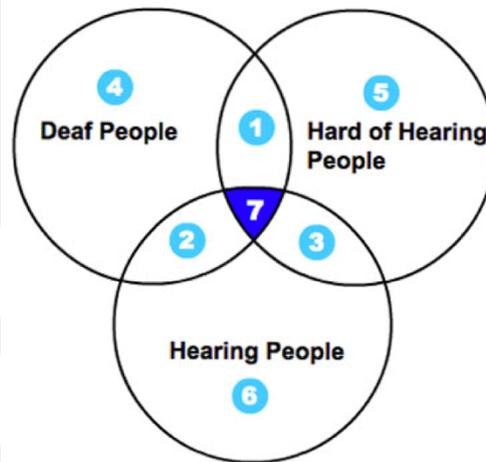
2.2.2 Tuli

Menurut World Health Organization (WHO), orang yang kehilangan pendengaran adalah mereka yang ambang pendengarannya dibawah 20 dB. Adapun kehilangan pendengaran ini bisa bersifat ringan, sedang, berat maupun dalam dan bisa terjadi pada salah satu telinga atau keduanya. Hal ini menyebabkan sulitnya mendengar pembicaraan atau suara keras (World Health Organization, 2021). Masalah pendengaran ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu *Hard of Hearing* (HoH) dan *Deaf*. Penggolongan ini didasarkan pada tingkat pendengarannya, di mana orang yang sulit mendengar (*Hard of Hearing*) adalah mereka yang dalam tahap ringan atau *mild* (bisa mendengar suara di antara 20 dan 40 dB), sedang atau *moderate* (bisa mendengar suara di antara 41 dan 70 dB), dan berat atau *severe* (hanya bisa mendengar suara antara 71 dan 95 dB). Sedangkan tuli (*deaf*) adalah mereka yang dalam tahap dalam atau *profound*, hanya bisa mendengar suara setara atau lebih dari 95 dB (Chang, 2014).

2.2.2.1 Komunikasi Tuli

Orang sulit dengar atau *Hard of Hearings* (HoH) biasa masih bisa berkomunikasi dengan bahasa lisan dengan dibantu alat dengar, implan koklea, pemberian teks, dan lainnya. Sedangkan orang tuli, hampir tidak bisa mendengar apa-apa sehingga menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasinya (World Health Organization, 2021). Bahasa isyarat adalah bahasa yang menggunakan gerakan tubuh serta ekspresi wajah dalam menyampaikan pesan atau kata-kata tanpa suara (Mursita, 2015). Dengan adanya keterbatasan dan perbedaan ini, maka ada berbagai tipe saluran komunikasi antara orang tuli, sulit dengar, dan orang dengar. Adapun saluran komunikasi tersebut dibagi menjadi 7 saluran, yaitu (1) tuli dengan sulit dengar, (2) tuli dengan dengar, (3) sulit dengar dengan dengar, (4) tuli dengan tuli, (5) sulit dengar dengan sulit dengar, (6) dengar dengan dengar, dan (7) tuli, sulit

dengar, dan dengar (Chang, 2014). Saluran komunikasi ini bisa digambarkan dalam diagram berikut.



Gambar 2.2 Saluran komunikasi antara Tuli, Sulit Dengar, dan Dengar
Sumber: (Chang, 2014)

Dengan banyaknya saluran komunikasi tersebut, maka adanya perbedaan metode komunikasi yang terjadi pula di dalamnya. Metode komunikasi yang bisa dilakukan berupa berbicara, bahasa isyarat, bicara terbatas (membaca gerak bibir), dan tulisan (Chang, 2014). Adapun penggunaan metode-metode ini dalam seluruh saluran komunikasi sebagai berikut.

Communication Methods	Categories (see Figure 1)						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Speech						√	
2. Sign Language				√			
3. Limited Speech (With lip movements/reading)			√		√		
4. Written Note (Include graphic messages)	√	√	√	√	√	√	√

Table 2. Communication Methods between Deaf, Hard of Hearing and Hearing People

Gambar 2.3 Metode komunikasi antara Tuli, Sulit Dengar, dan Dengar
Sumber: (Chang, 2014)

Dari tabel di atas, bisa dilihat bahwa media komunikasi yang digunakan Tuli adalah bahasa isyarat (*sign language*) dan tulisan (*written note*). Menurut WHO, media yang paling sering Tuli

gunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa isyarat (World Health Organization, 2021). Bahasa isyarat adalah bahasa yang menggunakan gerakan tubuh serta ekspresi wajah dalam menyampaikan pesan atau kata-kata tanpa suara (Mursita, 2015). Setiap negara memiliki bahasa isyaratnya masing-masing sama halnya dengan bahasa pada umumnya. Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis bahasa isyarat, yaitu Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO).

Berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Kemendikbud), SIBI adalah sistem bahasa isyarat yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan tatanan sistematis seperangkat isyarat jari, tangan, dan gerak yang melambangkan kosa kata Bahasa Indonesia. SIBI merupakan bahasa isyarat yang dikembangkan dari serapan *American Sign Language* (ASL). Dalam SIBI, terdapat 4 macam isyarat. Pertama adalah isyarat pokok berupa lambang isyarat sebuah kata. Kedua adalah isyarat tambahan yang melambangkan awalan, akhiran, dan partikel. Ketiga, isyarat bentukan yaitu gabungan dari isyarat pokok dan tambahan. Terakhir adalah abjad jari yaitu isyarat yang melambangkan masing-masing huruf abjad. Pada penerapannya, SIBI dilakukan berdasarkan seluruh struktur dan aturan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga urutan bahasa isyarat yang diterapkan akan sama dengan urutan kata-kata saat berbicara secara lisan. SIBI telah diresmikan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 dan sudah dibakukan oleh Kemendikbud pada 30 Juni 1994 sebagai bahasa yang digunakan dalam Sekolah Luar Biasa (SLB) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

Sedangkan BISINDO adalah bahasa isyarat yang terbentuk dan berkembang secara alamiah dari kebutuhan penyandang Tuli di Indonesia sejak 1966. Menurut Dewan Pengurus Daerah Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (DPD GERKATIN),

BISINDO adalah sistem komunikasi yang dikembangkan oleh tunarungu Indonesia dan berawalan dari bahasa ibu tanpa menggunakan struktur Bahasa Indonesia yang baik dan benar atau yang dibakukan (Mursita, 2015). Dalam praktiknya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mursita (2015), ditemukan bahwa 91% tunarungu Indonesia lebih memilih menggunakan BISINDO sebagai bahasa komunikasinya. Hal ini disebabkan bahwa BISINDO merupakan bahasa ibu tunarungu yang lebih mudah dan biasa digunakan. Sebagian besar tunarungu Indonesia tidak menggunakan SIBI karena penggunaannya terlalu sulit dan panjang karena harus menggunakan struktur Bahasa Indonesia termasuk imbuhan. Hal ini dirasa kurang praktis dan tidak ekspresif, karena SIBI lebih menekankan pada struktur bukan ekspresi. Adapun kosa kata SIBI masih kurang karena masih ada beberapa kata dengan makna yang berbeda namun menggunakan isyarat yang sama.

Penggunaan bahasa isyarat bagi Tuli pada dasarnya merupakan bentuk komunikasi langsung secara tatap muka dan bukan untuk di dunia digital dengan perantara media. Tapi hal ini tidak menutup kemungkinan Tuli untuk berkomunikasi melalui perantara media digital. Menurut penelitian Rahmawati, Hafiar, dan Karlinah (2019) mengenai Pola Komunikasi Kaum Tuli Dalam Media Baru, menunjukkan bahwa kaum Tuli juga menggunakan sosial media sebagai alat komunikasinya, fokus penelitian ini pada penggunaan sosial media Whatsapp. Penelitian ini menunjukkan komunikasi Tuli dalam sosial media berbasis teks dilakukan dengan transfer langsung BISINDO ke dalam kalimat teks, sehingga pola kalimat terbalik (Subjek-Objek-Predikat), tidak seperti kalimat pada umumnya (Subjek-Predikat-Objek). Kata-kata yang mereka sampaikan juga merupakan kata dasar tanpa adanya tambahan imbuhan dan kata hubung. Selain itu, kaum Tuli juga berkomunikasi lewat foto, video, dan emoji (Rahmawati, Hafiar, & Karlinah, 2019).

2.2.3 Inklusi

Inklusi dalam kelompok atau organisasi berarti orang dengan berbagai identitasnya memiliki kesempatan untuk hadir, didengar, dan dihargai juga berpartisipasi dalam kegiatan inti atas nama kelompok (Wasserman, Gallegos, & Ferdman, 2008). Inklusi merupakan konsep mengenai sejauh mana seorang individu mengalami perlakuan yang memenuhi kebutuhan mereka akan rasa memiliki dan keunikan dari sebuah kelompok. Dalam hal ini, inklusi memiliki tiga poin penting, yaitu inklusi merupakan pemenuhan kebutuhan individu dalam kelompok, inklusi memiliki dua komponen (rasa memiliki dan keunikan), serta menggambarkan bahwa kelompok yang mencakup individu, bukan individu yang terkoneksi pada kelompok (Shore et al., 2011; Jansen, Otten, Zee, & Jans, 2014).

Berdasarkan penelitian oleh Jansen et al. (2014), inklusi merupakan sebuah konsep dua dimensi yang terdiri dari dimensi kepemilikan (*belonging*) dan keaslian (*authenticity*). Dimensi-dimensi ini memiliki subkomponen tersendiri, di mana dimensi kepemilikan memiliki dua subkomponen berupa keanggotaan kelompok dan kasih sayang kelompok. Keanggotaan kelompok mempersepsikan ikatan hubungan antara individu dan kelompok. Sedangkan kasih sayang kelompok mengacu pada valensi positif dari ikatan tersebut. Pada dimensi kepemilikan, dilihat persepsi individu merasa diikuti sertakan dan diterima dalam kelompok (Jansen, Otten, Zee, & Jans, 2014).

Sedangkan dimensi keaslian memiliki subkomponen ruang untuk keaslian dan nilai dalam keaslian. Ruang untuk keaslian menggambarkan kelompok yang memperbolehkan individu merasa dan bertindak menurut keaslian dirinya. Nilai dalam keaslian menggambarkan tingkatan kelompok yang mendukung anggota untuk menjadi dirinya sendiri. Pada dimensi ini ditekankan bahwa individu harus bisa tetap menjadi dirinya sendiri.

Sehingga kelompok yang mencakup individu, bukan individu yang terkoneksi pada kelompok (Jansen , Otten, Zee, & Jans, 2014).

Kedua dimensi ini walau berbeda namun saling berkaitan. Sehingga konsep inklusi merupakan konsep di mana seorang diterima dan mendapatkan rasa kepemilikan di dalam kelompok tapi di saat yang bersamaan dihargai dan dilihat secara otentik sebagai dirinya sendiri.

Menurut Hinz dalam Kruse & Dederling (2017), makna luas inklusi adalah sebuah tujuan sosial yang secara konseptual mengacu pada empat dimensi. Pertama, penilaian keanekaragaman manusia, di mana inklusi melihat keanekaragaman manusia secara positif dan menyambutnya dengan baik, baik secara individu maupun kelompok. Kedua, relevansi dari semua aspek keanekaragaman manusia, inklusi tidak terbatas pada penyandang disabilitas tapi juga seluruh spektrum keanekaragaman manusia seperti jenis kelamin, etnis, dan sebagainya. Ketiga, dimensi politik, inklusi berakar pada gerakan hak-hak sipil yang diarahkan dalam bentuk marginalisasi sosial untuk secara aktif membongkar hambatan yang ada. Keempat, visi masyarakat inklusif, inklusif memerlukan visi masyarakat untuk memiliki hak yang tidak terbatas untuk menentukan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial (Hinz, 2012; Kruse & Dederling, 2017). Pada penelitian ini, akan difokuskan pada dimensi inklusi pertama, yaitu keanekaragaman manusia, khususnya kaum Tuli. Di mana akan dilihat apakah dalam praktik komunikasi di rumah ibadah, kaum Tuli disambut dan dilayani secara positif oleh warga rumah ibadah.

Sedangkan inklusi dalam arti yang lebih sempit ternyata sangat erat kaitannya dengan dunia edukasi, di mana inklusi merupakan pendekatan yang memperjuangkan edukasi bagi murid dengan kebutuhan edukasi khusus untuk berada dalam sistem sekolah umum (Kruse & Dederling, 2017). Salah satu perdebatannya adalah edukasi bagi anak-anak tuli apakah harus dikonsiderasikan berbeda dari murid lain bila tujuannya untuk menciptakan inklusifitas di kehidupan sosial secara luas (Power, 2002).

Dalam menganalisa konsep inklusi penelitian ini, digunakan dua indikator inklusi oleh Jansen dkk. (2014), yaitu rasa memiliki dalam kelompok dan keotentikan individu. Kemudian peneliti juga menggunakan satu dari empat makna inklusi menurut Hinz dalam Kruse & Dederling (2017), yaitu keanekaragaman manusia. Hal ini untuk mengetahui layanan dan penerimaan teman Tuli dalam rumah ibadah. Sehingga bisa menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana komunikasi dalam rumah ibadah dapat inklusif bagi penyandang disabilitas Tuli.

2.2.4 Aksesibilitas

Menurut United Nation, aksesibilitas merupakan adanya penyediaan fleksibilitas untuk mengakomodasi setiap kebutuhan dan preferensi pengguna, terutama dalam hal ini merujuk pada penyandang disabilitas, baik berupa barang atau layanan secara fisik maupun virtual yang bisa digunakan bagi berbagai penyandang disabilitas (United Nation, 2013). Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dapat diartikan sebagai hak untuk berpartisipasi secara setara tanpa dibatasi halangan fisik dan mental, termasuk kemampuan memasuki gedung, dapat berpartisipasi aktif, dan dapat menggunakan fasilitas atau teknologi yang digunakan orang tanpa disabilitas (Jaeger & Bowman, 2005). Akses bagi penyandang disabilitas dilihat dalam dua bentuk, yaitu akses fisik berupa objek dan tempat dan akses intelektual berupa ide dan informasi, termasuk mengenai bagaimana informasi dikategorikan, disusun, ditampilkan, dan dipresentasikan (Jaeger & Bowman, 2005).

Aksesibilitas menurut konsep United Nation bukan hanya berupa hak asasi penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat, tapi juga sebagai isu pembangunan yang memastikan bahwa penyandang disabilitas bisa hidup dengan independen berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan pembangunan setara dengan yang lainnya. Dalam hal ini kaum disabilitas diusahakan untuk hidup mandiri, bisa dilibatkan dalam

komunitas, melakukan mobilitas personal, bebas berpendapat dan berekspresi, dan juga memiliki akses kepada informasi. Aksesibilitas dilihat sebagai pemberdayaan kaum disabilitas dalam seluruh kehidupan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek. Adapun bentuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas berupa lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi (United Nation, 2013).

Tak jauh berbeda, menurut UU no 8 tahun 2016, pasal 1 ayat 8, aksesibilitas merupakan “kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan”. Adapun kesamaan kesempatan yang dimaksud adalah penyediaan akses untuk menyalurkan potensi penyandang disabilitas dalam segala aspek kemasyarakatan. Disamping itu dalam pasal 5 mengenai hak penyandang disabilitas, tertulis bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapat aksesibilitas, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Adapun menurut pasal 18, hak aksesibilitas penyandang disabilitas meliputi pendapatan akses dalam pemanfaatan fasilitas publik dan akomodasi yang layak (JDIH BPK RI, 2016).

Dalam analisa konsep aksesibilitas penelitian ini, akan digunakan indikator akomodasi kebutuhan untuk menjawab pertanyaan bagaimana penyandang disabilitas Tuli mengikuti ibadah dalam rumah ibadah. Selain itu, akan dilihat juga indikator independensi teman Tuli selama beribadah untuk melihat apakah teman Tuli sudah mendapat akses yang layak agar bisa beribadah secara mandiri. Konsep ini membantu menjawab pertanyaan peneliti mengenai bagaimana penyandang disabilitas Tuli mengikuti ibadah dalam rumah ibadah, sekaligus dapat memberi masukan penilaian mengenai apakah tempat ibadah sudah inklusif dan bagaimana cara membuatnya inklusif.

2.3 Alur Penelitian

Berikut adalah alur penelitian yang dirancang peneliti:



Gambar 2.4 Alur penelitian